

**FUNGSI KELUARGA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM
PROSES PENDIDIKAN
(TINJAUAN SOSIOLOGIS)**

Hj. Eny Suhaeni*

Abstrak

Sebagai bagian dari sebuah Pranata Sosial, Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan produk manusia Indonesia yang dapat bersaing tidak saja di kancah nasional namun juga internasional. Untuk menghadapi tantangan global ini, sistem pendidikan harus bersifat semesta dan menyeluruh dan berorientasi pada wahana keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

Dalam visi dan misi Pendidikan Nasional yang diamanatkan dalam konstitusi Pancasila dan UUD 1945, bahwa Pendidikan harus berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap berbagai tuntutan dan tantangan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa secara menyeluruh : keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Keluarga merupakan elemen dasar bagi sosialisasi nilai – nilai dalam pendidikan. Keluarga menjadi pilar utama dalam melaksanakan sosialisasi kehidupan, di dalamnya ada anggota-anggota yang saling bekerja sama: ayah, ibu, dan anak-anak. Dan saudara-saudara yang lain , merupakan tempat kontak pertama bagaimana cara bekerja sama dan hidup bersama orang lain.

Proses pendidikan akan berjalan seimbang dan berkeselamatan apabila masyarakat ikut bertanggung jawab atas berlangsungnya proses pendidikan. Masyarakat adalah juga bagian pilar penting setelah keluarga sebagai penyangga yang wajib bertanggung jawab atas keberhasilan produk pendidikan. Masyarakatlah yang ikut menentukan hitam putihnya dunia pendidikan. Masyarakat mempunyai sistem nilai, norma, aturan dan lain-lain. Yang kesemuanya terjalin dalam satu wadah besar kebudayaan nasional. Masyarakat memiliki harapan besar terhadap dunia pendidikan yang memadai, status sosial yang di hargai, peranan sosial yang sempurna, masa depan yang lebih baik.

Sejalan dengan tantangan dan masalah-masalah tersebut di atas, pilar lain yang tak kalah pentingnya adalah peran pemerintah dalam proses pendidikan. Dalam pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

* Adalah Dosen Tetap Yayasan Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang.

Dengan demikian pemerintah diwajibkan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Artinya prinsip pendidikan nasional harus menjamin proses pendidikan secara merata dan berkeadilan.

A. PENDAHULUAN

Proses globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan percepatan menggulingkannya liberalisasi ekonomi serta sistem perdagangan bebas secara global, menghadapi dunia pendidikan pada tantangan-tantangan baru yang tidak sederhana. Ada beberapa pertanyaan mendasar dan tantangan yang muncul sehubungan dengan perubahan-perubahan besar yang terjadi pada peralihan abad ini. Mampukah dunia pendidikan menghadapi dan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan memiliki kesanggupan bersaing secara internasional dan sekaligus siap melakukan kerjasama antar bangsa? Mampukah dunia pendidikan memperkokoh kepribadian dan memperkuat karakter kebudayaan nasional di tengah arus globalisasi yang serba cepat? Dapatkah para pendidik menanamkan nilai-nilai etika, moral dan memperkuat karakter anak-anak bangsa yang berorientasi pada perdamaian, kerjasama di tengah kekerasan yang terus berlangsung dalam pentas dunia? Mampukan dunia pendidikan mengorientasikan tingkah laku pribadi, dunia usaha dan masyarakat politik untuk bersikap memelihara kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragamansumberdaya hayati ditengah kelangkaan sumber daya dan planet bumi yang semakin rentan ini? Siapa sajakah yang bertanggung jawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas? Keluarga, masyarakat, pemerintah atau dunia pendidikan sebagai sebuah pranata sosial ?

Pertanyaan dan tantangan globalisasi ini tentu saja harus dijawab secara objektif, sesuai dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang sudah disepakati bersama, agar pertanyaan-pertanyaan tadi diperoleh jawaban yang secara holistik bisa dipertanggungjawabkan.

Sesungguhnya salah satu pilar maha penting yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia secara nasional dan internasional adalah lembaga pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan rangkaian upaya manusia untuk mewujudkan manusia seutuhnya, yang menekankan pada harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia. Oleh sebab itu pendidikan berkualitas merupakan suatu keniscayaan yang harus di sokong oleh berbagai elemen masyarakat-bangsa.

Dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia, beberapa perubahan paradigma pendidikan sudah sering dilakukan, bahkan seluruh unsur-unsur penunjang dan elemen-elemen yang mendasar sudah mulai mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini tertuang dalam visi, misi serta strategi pendidikan nasional untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sempurna dan utuh menyeluruh.

Sistem pendidikan nasional yang semesta, menyeluruh dan terpadu dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya serta wahana kelangsungan hidup bangsa dan negara, pada hakikatnya menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia dan dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah.¹

Bahkan dalam rencana pembangunan lima tahunan juga ditegaskan bahwa pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama, keluarga, masyarakat dan pemerintah serta diusahakan agar dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

B. Visi, Misi Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap berbagai tuntutan dan tantangan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan perjuangan seluruh elemen lapisan masyarakat. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Berdasarkan visi tersebut, jelaslah bahwa pendidikan nasional berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia yang menekankan pada harkat, martabat, hak dan kewajiban yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika, maupun logika. Pembangunan kualitas sumber daya tersebut tidak terbatas pada kelas/kelompok tertentu, baik secara ekonomi, budaya, sosial, suku, agama, ekonomi dsb. Namun berlaku dan berlangsung pada seluruh proses kehidupan manusia.

Dengan visi pendidikan tersebut di atas, pendidikan nasional juga memiliki misi sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global: dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik/peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Adapun beberapa strategi dalam pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional no 20 thun 2003 antara lain :

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis karakter
3. Proses pembelajaran yang mendidik, egaliter dan dialogis
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan
6. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan
7. penyediaan sarana belajar yang edukatif

8. pelaksanaan sistem wajib belajar 9 tahun
9. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan
10. Pemberdayaan peran serta masyarakat
11. Pusat kebudayaan dan Pembangunan masyarakat
12. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. ²

Dengan strategi tersebut, diharapkan visi, misi dan arah pendidikan nasional terealisasi dengan efektif dengan melibatkan sejumlah elemen/komponen bangsa secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. memberdayakan berbagai komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kekeluargaan, kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat, seperti yang tertuang dalam pasal 4 ayat 2 UU SISDIKNAS no 20/2003.³

Terkait dengan visi, misi dan strategi pendidikan nasional tersebut di atas, selanjutnya telah ditetapkan sejumlah prinsip yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas anak didik.

Berdasarkan prinsip tersebut telah menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran yang telah berlangsung sejak lama yang lebih menitikberatkan peran guru dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Paradigma itu bergeser ke paradigma pengajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan pengetahuan, teknologi, spiritualitas keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, cerdas, inovatif, beretika, berestetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

C. Pendidikan dan Pranata Sosial

Kata *prana* memiliki pengertian sebagai seperangkat aturan yang berkisar di sekitar kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. *Pranata*, sebagai sistem tingkah laku sosial bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku dan seluruh perlengkapan dari seluruh kompleksitas manusia dalam masyarakat. Atau dapat juga diartikan bahwa pranata sosial adalah lembaga sosial (*Social Institutional*) sebagai sistem pola sosial yang tersusun rapi dan relatif bersifat permanen serta mengandung sikap, cita-cita, perilaku tertentu yang kokoh dan bertujuan untuk memberikan kepuasan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.⁴

Pranata sosial memiliki fungsi sebagai pedoman atau pegangan yang mengatur bagaimana seorang individu, kelompok atau masyarakat bertingkah laku. Pentingnya pranata dimaksudkan agar bisa menjaga keteraturan dan integrasi dalam masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat⁵, mengatakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. yang menekankan pada kelakuan atau norma untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pada setiap masyarakat setidaknya terdapat lima lembaga/pranata sosial (*social institution*) yakni ; Keluarga, Pendidikan, Agama, Ekonomi, dan Pemerintah. Tiap Pranata sosial memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing, dan ciri-ciri pranata sosial : (1) memiliki lambang atau simbol; (2) memiliki tradisi dan tata tertib; (3) memiliki satu atau beberapa tujuan; (4) memiliki nilai; (5) memiliki waktu lebih lama atau kekebalan tertentu; dan (6) memiliki alat kelengkapan

Dari uraian di atas jelas, bahwa dunia pendidikan merupakan bagian dari Pranata Sosial, yang memiliki tujuan, fungsi, peran, dan karakter yang permanen, bersifat kekal. Sebab menurut Bruce J Cohen (1992)⁶ bahwa Pranata sosial memiliki karakteristik diantaranya *Pertama*, pranata sosial memiliki tujuan utama berupa kebutuhan khusus masyarakat. Misalnya demi tercapainya sasaran lembaga, tiap lembaga memiliki fungsi ganda yang harus dilaksanakan. Keluarga memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari serangan pihak luar, dan menetapkan norma/peraturan.

Kedua, keluarga mengandung nilai-nilai utama yang bersumber dari anggotanya, di Indonesia misalnya kita menjumpai dalam lembaga pemerintahan

meliputi sistem demokrasi Pancasila, sistem pemilihan umum, perwakilan legislatif, dan persamaan kedudukan di mata hukum.

Ketiga, Pranata relatif bersifat permanen, dalam hal pola-pola perilaku yang ditetapkan dalam lembaga menjadi bagian dari tradisi kebudayaan yang ada. Misalnya di Barat terdapat sistem perkawinan monogami yang kuat yakni suami dengan hanya satu istri.

Keempat dasar-dasar pranata begitu luas sehingga kegiatan-kegiatan menempati kedudukan sentral dalam masyarakat, perubahan pada suatu lembaga kemungkinan besar dapat mengakibatkan perubahan pada lembaga lainnya. Misalnya, semua lembaga dalam masyarakat terpengaruh oleh goncangan keras dari siklus ekonomi.

Kelima, meskipun semua pranata memiliki semua sifat saling ketergantungan dalam masyarakat, masing-masing lembaga disusun dan diorganisasikan secara sempurna di sekitar rangkaian pola-pola normal, nilai perilaku diharapkan. Misalnya, lembaga pendidikan telah disusun menjadi sangat teratur dan sangat birokratis. Nilai tinggi diberikan kepada pelajaran dan akumulasi pengetahuan, usaha memperoleh tingkat yang tinggi, kenaikan dari satu kelas ke kelas berikutnya, pengembangan kebiasaan belajar yang efektif dan kerjasama yang baik antara pendidik/guru atau sesama peserta didik.

Keenam, ide-ide pranata umumnya diterima mayoritas anggota masyarakat, tidak peduli apakah mereka ikut berpartisipasi atau tidak dalam lembaga. Misalnya, seorang anggota dalam masyarakat, dalam keluarga akan mengakui dan menerima lembaga keluarga dalam hubungannya dengan fungsi yang harus dijalankannya. Meskipun yang bersangkutan menjauhi struktur tradisi keluarga, dia tidak perlu menyarankan tipe organisasi baru untuk menggantikan unit keluarga.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa peran suatu lembaga dalam kehidupan, tidak hanya melahirkan pola aktivitas dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun juga terdapat pola organisasi untuk melaksanakannya.

D. Fungsi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah dalam Proses Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu fungsi lembaga atau pranata sosial yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas masyarakat dalam berbangsa dan

bernegara. Pendidikan dilaksanakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan dan melibatkan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan. Sebab masyarakat senantiasa mengalami kecenderungan berubah, baik secara berencana maupun tidak direncanakan. Pendidikan juga dituntut untuk cepat respon terhadap segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

D.1. Fungsi keluarga

Keluarga merupakan wadah atau lembaga yang sangat penting dalam proses pendidikan manusia. Keluarga merupakan sumber utama dalam proses pendidikan. Ia merupakan kelompok sosial pertama dan utama dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pendidikan paling mendasar, karena dalam keluarga lah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Keluarga menjadi pilar utama untuk melaksanakan sosialisasi kehidupan, di dalamnya ada anggota-anggota yang saling bekerjasama; ayah, ibu, dan anak-anak. Dan saudara-saudara yang lain merupakan tempat kontak pertama bagaimana cara bekerjasama dan hidup bersama orang lain.

Di dalam proses pendidikan, keluarga memiliki cara dan pola-pola pendidikan yang kemungkinan berbeda satu sama lain. Cara-cara dan pola-pola pendidikan tersebut akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, perilaku, budi pekerti, nilai, norma, aturan dan kepribadian masing-masing keluarga. Pendidikan yang diterima itulah yang akan digunakan oleh anak-anak atau anggota-anggotanya sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di lingkungan lainnya, yakni sekolah.

Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap pendidikan anak-anaknya lebih berorientasi pada pembentukan watak, karakter dan atau budi pekerti, latihan keterampilan dan pendidikan kemasyarakatan, seperti penanaman nilai tolong menolong, bekerjasama menjaga lingkungan kebersihan rumah, menjaga ketentraman dan kesehatan rumah tangga dan lainnya.

Menurut Jalaludin Rahmat⁷ Perkawinan merupakan prasyarat lahirnya sebuah keluarga, ia merupakan ikatan seksual yang disahkan secara sosial, dimulai dengan (1) pengumuman terbuka; (2) diusahakan dengan gagasan kelestarian, merinci kewajiban timbal balik antara pasangan yang menikah, dan antara pasangan tersebut dengan anak-anaknya. Selanjutnya menurut Jalaludin, bahwa Keluarga adalah dua orang atau lebih yang tinggal bersama dan terikat karena darah, perkawinan, dan adopsi.

Terdapat beberapa fungsi dalam keluarga, diantaranya:

1. Fungsi ekonomis: keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, yang dari situ anggota-anggota keluarga mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya.
2. Fungsi sosial : keluarga memberikan prestise dan status terhadap anggota-anggotanya.
3. Fungsi edukatif : keluarga memberikan pendidikan kepada anggota-anggotanya
4. Fungsi Protektif : keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman fisik , ekonomis dan psikososial.
5. Fungsi Religius : Keluarga memberikan pengalaman kepada anggota-anggota keluarganya
6. Fungsi rekreatif : keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggota keluarganya
7. Fungsi afektif : keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan

Sebuah keluarga akan kokoh bila seluruh fungsi di atas berjalan sebagaimana seharusnya, jika salah satu fungsi tidak bergerak, maka akan terjadi krisis keluarga, misalnya bila keluarga gagal menanamkan fungsi edukatif (menanamkan norma-norma agama), maka anak yang lahir dalam keluarga tersebut tidak berhasil disosialisasikan. Kesalinghubungan antar fungsi tersebut akan menentukan model keluarga yang itegratif, harmonis dan penuh ketenangan. Keluarga yang mengalami disfungsi dan ketidakmampuan menjalankan fungsinya cenderung rawan mengalami konflik dan disharmoni.⁸

Probbins membagi model keluarga ke dalam tiga bentuk :⁹

1. Keluarga yang bersifat otoriter : Di sini perkembangan anak semata ditentukan oleh orang tuanya. Sifat pribadi anak yang berasal dari keluarga otoriter biasanya cenderung suka menyendiri, mengalami keterlambatan kematangannya, lambat berinisiatif dan ragu dalam melakukan tindakan.
2. Keluarga yang demokratis : Di sini sikap dan pribadi anak cenderung fleksibel, adaptif dan pandai menguasai diri serta pandai menghargai orang lain. Mampu menerima

kritik

dengan terbuka, aktif, matang dan memiliki rasa tanggung jawab.

3. Keluarga yang liberal : Di sini anak-anak bebas bertindak dan berbuat, cenderung agresif, tidak mampu bekerjasama dengan orang lain, sulit beradaptasi, emosi tidak stabil serta mempunyai sifat curiga.

Tiga model atau type keluarga tersebut di atas akan sangat mempengaruhi sikap, tindakan dan emosi di dalam proses pendidikan. Proses pendidikan dalam keluarga akan sangat menentukan hasil dari fungsi pendidikan.

Dilihat dari ruang lingkupnya, pendidikan terdiri dari tiga jenis. *Pertama*; Pendidikan dalam keluarga (informal), yakni proses pendidikan berlangsung dalam keluarga dan lingkungannya. *Kedua*; Pendidikan di sekolah (formal), yakni proses pendidikan berlangsung secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. *Ketiga*; Pendidikan dalam masyarakat (non formal), yakni proses pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara berjenjang dan terstruktur, misalnya kursus-kursus, pelatihan dsb.

D.2. Fungsi Masyarakat dalam proses pendidikan

Proses pendidikan akan berjalan seimbang, dan berkesinambungan apabila masyarakat ikut bertanggung jawab atas berlangsungnya proses pendidikan tersebut. Masyarakat merupakan salah satu pilar penyangga yang wajib bertanggung jawab atas keberhasilan fungsi pendidikan.¹⁰ Tanpa peran masyarakat proses pendidikan akan mengalami ketimpangan. Sebab peran dan fungsi masyarakat telah dijamin oleh undang-undang untuk ikut menentukan keberhasilan pendidikan.

Adapun pengertian masyarakat, dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata 'masyarakat' berasal dari bahasa Arab, yakni *syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain, dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Untuk pengertian yang lebih luas masyarakat adalah satu kesatuan sosial yang mempunyai ikatan kasih sayang yang erat secara emosional untuk mewujudkan cita-cita atau kepentingan bersama.¹¹ Masyarakat merupakan bagian dari pranata sosial sebagai wahan berinteraksi dan ikut mengatur dan mengarahkan tindakan-tindakan individu/kelompok dengan pola-

pola yang telah disepakati. Jiwa masyarakat merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status, dan peranan sosial. Pranata merupakan sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan khusus manusia. Status atau kedudukan sosial dapat netral, tinggi, menengah, rendah hubungannya terkait dengan pola tindak interaksi yang dikonsepsikan oleh norma yang menata seluruh tindakan tadi. Peranan sosial adalah tindakan atau tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu, bersifat khas, tertentu dalam berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukan lain.¹²

Ferdinand Tonnies dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto mengungkapkan bahwa masyarakat terbagi atas dua type, yakni : *Pertama, gemeinschaft* (hubungan primer), merupakan bentuk kehidupan bersama antara anggotanya, memiliki hubungan batin yang murni yang bersifat alamiah dan kekal. Dasar dari hubungan type masyarakat ini adalah rasa cinta dan persatuan batin yang nyata dan mekanis. Hal ini bisa ditemukan dalam model masyarakat desa, keluarga dan kerabat. *Kedua, gessellschaft* (hubungan sekunder) merupakan bentuk kehidupan bersama yang anggotanya mempunyai hubungan sifat pamrih dan dalam jangka waktu yang pendek dan bersifat organis, ditemukan dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik.¹³

Selanjutnya, masyarakat juga dapat dibedakan ke dalam konteks masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Kedua type masyarakat ini masing-masing memiliki ciri khasnya. Masyarakat pedesaan berbeda sistem kehidupannya dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan-perbedaan ini berasal dari keadaan lingkungan, yang mengakibatkan adanya dampak terhadap personalitas dan segi-segi kehidupan. Kesan populer masyarakat perkotaan terhadap masyarakat pedesaan adalah bodoh, lambat dalam berfikir dan bertindak, serta mudah 'tertipu' dsb. Sementara masyarakat perkotaan memiliki ciri-ciri khas yakni, modern, terbuka dan mobilitas tinggi. Durkheim menyebut ciri masyarakat desa cenderung bersifat tradisional dan mekanis (berbasis masyarakat pertanian) sementara ciri masyarakat kota adalah modern dan bersifat organis (berbasis industri).

Terlepas dari adanya perbedaan type-type masyarakat di atas, proses pendidikan selalu diorientasikan pada kontribusi besar dari sebuah masyarakat. Masyarakatlah yang ikut menentukan hitam putihnya dunia pendidikan. Masyarakat mempunyai sistem nilai, norma, aturan, dan lain-lain, yang kesemuanya terjalin dalam satu wadah besar yakni nilai kebudayaan nasional. Nilai-nilai tersebut yang lokal dan unik, dalam skala nasional akan di olah

menjadi nilai kebangsaan dalam satu kesatuan yang kemudian di kontrol pula pelaksanaannya oleh masyarakat secara bersama-sama.

Adapun proses pendidikan yang merupakan pranata sosial merupakan tanggung jawab bersama bagi masyarakat dalam keberhasilannya. Oleh sebab itu masyarakat sebagai salah satu sumber terpenting dalam proses pendidikan dan memiliki harapan besar terhadap fungsi pendidikan, harus terus menerus menjalin interaksi dengan berbagai elemen. John. I. Goodlad (1984), menyatakan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap pendidikan yang memadai, status sosial yang dihargai, peranan sosial yang sempurna, masa depan yang lebih baik dalam kehidupannya.

Dalam proses pembangunan bangsa, masyarakat merupakan satu kesatuan jiwa yang sangat kuat, sehingga muncul adanya istilah, kehendak masyarakat, kesadaran masyarakat, masyarakat pendidikan, masyarakat berkualitas, dsb.

Kemantapan unsur-unsur masyarakat dalam proses penegakkan fungsi pendidikan akan mempengaruhi struktur sosial. Dalam hal ini struktur sosial yang dibangun melalui sektor pendidikan akan sangat terlihat berdasarkan pada kualitas sumber daya manusianya. Menurut Durkheim, masyarakat yang berhasil membangun kohesivitas bersama dalam penegakkan pranata akan sampai pada pola-pola hubungan yang harmonis dan berkarakter, dengan tingkat interaksi tinggi dan kohesif.¹⁴

D.3. Fungsi Pemerintah

Dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa pemerintah Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial. Dengan demikian pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak generasi penerus keberlangsungan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Berdasarkan pernyataan peraturan undang-undang di atas, jelas bahwa pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam proses pembangunan kualitas dan kecerdasan masyarakat. Sektor pendidikan dan segala macam

prosesnya meniscayaan kemampuan pemerintah untuk membangunnya dengan baik. Penyelenggaraan dan proses pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia sangat tergantung kepada ikap pemerintah. Pemerintah sebagai penyandang dana, harus dapat mengimplementasikan amanat undang-undang dengan benar. Di mulai dari memberikan ketersediaan sarana dan prasarana; gedung sekolah yang layak, dan fasilitas pendukung lainnya, perpustakaan, tempat ibadah, laboratorium dan sebagainya.

Selain ketersediaan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lainnya, pemerintah juga harus terus menerus mengupayakan kualitas sumber daya manusia pendidikan; guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki kemampuan mendidik secara profesional dan inovatif. Persoalan tenaga pendidik secara terus menerus harus mendapat perhatian khusus, sebab sektor sumber daya manusia inilah yang turut andil menentukan kualitas manusia Indonesia. Sejalan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah wajib menyediakan para pendidik dengan kualitas keahlian yang memadai. Pemerintah tidak sekedar menyediakan tenaga guru profesional secara tekhnis namun juga cerdas dalam berfikir dan memiliki wawasan luas, sehingga tujuan dan harapan terhadap pranata pendidikan terlampaui.

Disamping itu, pemerintah juga harus menata dan memperhatikan kesejahteraan para pendidik/guru. Selama ini yang terjadi seringkali ada tenaga pendidik yang kehidupan ekonominya sangat tidak layak, bahkan ada tenaga pendidik yang mengambil posisi sebagai tukang ojek dan sebagainya. Ini sebuah fenomena yang memprihatinka. Pemerintah berdasarkan undang-undang harus mengatur secara adil distribusi anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan pendidikan. Meski berdasarkan Undang-undang no 20/2003, pemerintah sudah memberlakukan sertifikasi untuk menunjang kesejahteraan para tenaga pendidik. Hal ini belumlah bisa mengcover semua kebutuhan sesuai kenyataan di lapangan, namun ini sebuah kebijakan yang inovatif dan perlu terus menerus dilakukan evaluasi dalam perkembangannya sesuai dengan tingkat perubahan masyarakat.

Belum lagi jika kita membahas standar isi dari proses pendidikan; yakni kurikulum, eemerintah harus mengupayakan kualitas kurikulum yang berorientasi pada tujuan utama pendidikan, yakni membangunkualitas pendidikan yang cerdas dan berkeadilan. Jangan sampai pembuatan kurikulum berubah seiring rezim berubah. Hal ini yang sering terjadi dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Bahkan sejak pergantian presiden,tahun 2012, kurikulum berlaku dua model, KTSP tahun 2006 dan K13 tahun 2013. Hal ini mengakibatkan kebingungan dikalangan para praktisi pendidikan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara atau metode untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.¹⁶ Kurikulum berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan tujuan pendidikan pada masing-masing jenis/jenjang/satuan pendidikan yang pada gilirannya merupakan proses pencapaian ke arah pendidikan nasional. Kurikulum disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan keadaan masyarakat serta taraf perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada saat itu.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka lahirlah kurikulum 2013 sebagai pengganti dari kurikulum tahun 2006, yang mengacu pada UU SISDIKNAS no 20 tahun 2003. Kurikulum ini berbasis pada pembangunan karakter, maka sebutan lain dari K13 ini adalah Kurikulum berbasis karakter.

E. MEMBANGUN SINERGITAS KELUARGA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM PENDIDIKAN

Istilah sinergitas merupakan kata lain dari *sincronitation of energi*. Dengan demikian sinergi terjadi karena ada beberapa energi yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama terjadi dengan melakukan sinkronisasi berbagai kepentingan bersama agar menghasilkan secara lebih besar dan lebih baik dibandingkan dengan dilaksanakan sendiri-sendiri. Sinergitas dimaksud harus diarahkan pada tujuan bersama, kepentingan bersama meskipun terdapat banyak perbedaan namun perbedaan selalu diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai bersama.

Karena pendidikan menjadi tanggung jawab semua unsur, maka tak bisa dielakkan bahwa sinergitas antara keluarga, masyarakat dan pemerintah harus dibangun. Tujuannya adalah agar keberhasilan proses pendidikan yang di cita-citakan bersama dapat terlampaui. Tiga pilar utama, yakni Keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam proses pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan peradaban bangsa. Oleh sebab itu tiga pilar ini masing-masing memiliki fungsinya masing-masing dan juga tanggung jawab masing-masing. Keluarga merupakan pilar dasar dalam proses pembentukan karakter individu. Keluarga memiliki fungsi mensosialisasikan nilai-nilai, norma dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama baik oleh keluarga itu sendiri, masyarakat dan pemerintah. Maka keluarga bertanggung jawab penuh atas setiap sikap dan tindakan anggota-anggotanya, yang menjadi bagian dari masyarakat dan pemerintah. Keluarga sebagai bagian dari pranata, memiliki fungsi sebagai

agen sosialisasi paling awal. Dan akan sangat menentukan proses berlangsungnya kemajuan di dalam masyarakatnya.

Demikian juga peran masyarakat dalam proses pendidikan. masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari keberhasilan proses pendidikan. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan, bangsa ini tidak memiliki kekuatan apapun. Masyarakat merupakan bagian dari proses pendidikan karena di dalamnya terdapat interaksi sikap, tingkah laku, tindakan dan nilai-nilai yang dipersatukan dari individu ke dalam komunitas bersama. Dan segala tingkah laku dan tindakannya di atur dengan pola-pola aturan/undang-undang hukum adat, dsb. Dan masyarakat terbangun dari kekuatan individu-individu yang memiliki nilai, aturan, norma bawaan sesuai dengan yang telah disosialisasikan dalam keluarga masing-masing, kemudian disatukan dalam nilai –nilai kebersamaan untuk mencapai cita-cita dan harapan bersama.

Dalam proses pendidikan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai, norma, aturan-aturan, hukum-hukum yang di usung bersama dalam keluarga dan masyarakat itu sendiri. Keluarga adalah bagian dari masyarakat, sebaliknya masyarakat adalah juga bagian dari keluarga, maka sinergitas keduanya harus terbangun demi mencapai keberhasilan proses pendidikan.

Pilar lain yang juga tak kalah penting adalah pemerintah. Pilar ini merupakan pondasi lain yang turut menegakkan dan menentukan proses pendidikan bisa berjalan dengan baik atau tidak. Proses berlangsungnya pendidikan tentu di atur dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari rahim pemerintah. Tanpa keterlibatan pemerintah, apa yang di usung oleh keluarga dan masyarakat tidak akan berhasil dengan baik. Sebab pemerintahlah yang berhak mengeluarkan peraturan-peraturan, undang-undang, norma, nilai secara absah. Pemerintah pula lah yang menyandang anggaran dalam setiap proses pelaksanaan dan penyelenggaraan undang-undang , baik ekonomi, sosial, politik dan pendidikan dsb.

Tanggung jawab pemerintah dalam proses penyelenggaraan pendidikan di atur dalam undang-undang dasar tahun 1945 dan undang-undang sisdiknas no 20 tahun 2003 . Demikian juga proses pendidikan tanpa peran keluarga di dalamnya tidak akan menghasilkan pemebentukan karakter individu dengan baik. Sebaliknya proses pendidikan tanpa dukungan masyarakat, memiliki makna apapun, sebab individu akan masuk dalam komunitas masyarakat dengan membawa nilai-nilai kebersamaan. Masyarakat disamping menjadi sumber ajar, ia juga menjadi alat pengontrol bagi sikap dan tindakan individu. Masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap cita-cita bersama. Kehendak masyarakat dalam

proses pendidikan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa masyarakat melibatkan diri sebagai pengawas dan pengontrol atas terlaksananya proses tersebut. Terakhir, pemerintah sebagai bagian tak terpisahkan yang menjadi penyokong utama dalam bidang anggaran bagi pelaksanaan cita-cita keluarga dan masyarakat. Pemerintah di dalam pengelolaannya adalah juga individu dan masyarakat, maka cita-cita penegakkan negara yang berkualitas, masyarakat yang berkualitas, individu yang berkualitas tergantung kualitas penyelenggaraan pemerintah terutama di sektor pendidikan. Maju mundurnya kualitas bangsa tergantung pada penyelenggaraan manajemennya. Terutama dalam sektor pendidikan, hal ini menjadi penentu utama sebuah peradaban bangsa diperhitungkan atau tidak di pentas dunia.

Akhirul kata, semoga tiga pilar yang sudah di bahas ini menjadi bahan pemikiran bagi para ulil Albab. *Wallahu a'lam bissawwab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi,. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya: 2007.
- Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan*, , Prenada Media, Bogor: 2003
- Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), 2010*
- M. Dawam Rahardjo, *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*, akarta, PT Internusa: 1997.
- Idi Abdullah, H. *Sosiologi Pendidikan, Individu, masyarakat dan Pendidikan*, Jakarta, PT Raja Grafindo: 2001.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi III*, Jakarta, Rineka Cipta Press: 2005.
- Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif, Ceramah-Ceramah di Kampus*, Bandung, Mizan: 1986.
- Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama: 2006.
- Robinson, Philip, *Beberapa perspektif Sosiologi pendidikan*, Jakarta, CV rajawali Press: 1986.
- S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara Press: 2009
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 1997,
- Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, , Jakarta, Gunung Agung: 1969.

¹ *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, . 2010,

² Rahardjo,M. Dawam *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*, 1997,Jakarta, PT Internusa,

³ *Undang-Undang Sisitem Pendidikan Nasional no 20 Tahun 2003*, 2010, Bandung, Penerbit Citra Umbara

⁴ Idi Abdullah, H. *Sosiologi Pendidikan, Individu, masyarakat dan Pendidikan*, Jakarta, PT Raja Grafindo: 2001

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi III*, 2005, Jakarta, Rineka Cipta Press

⁶ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama: 2006.

⁷ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif, Ceramah-Ceramah di Kampus*, Bandung, Mizan: 1986.

⁸ Abu Ahmadi,. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya: 2007.

⁹ Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, , Jakarta, Gunung Agung: 1969.

¹⁰ Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan*, , Prenada Media, Bogor: 2003.

-
- ¹¹ Soekanto Soerjono, , *Sosiologi Suatu Pengantar*, 1997, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- ¹² Sanderson, SK. *Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Realitas Sosial*. 2000, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- ¹³ Robinson, Philip, *Beberapa perspektif Sosiologi pendidikan*, 1986, jakarta, CV rajawali Press
- ¹⁴ S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan, 2009*, Jakarta, Bumi Aksara Press
- ¹⁵ *Undang-Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 dan tentang Peraturan Pemerintah, 2010*, Bandung, Citra Umbara
- ¹⁶ *Perundangan tentang Kurikulum Sistem pendidikan nasional 2013, 2013*, jakarta, PT Buku Seru